

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DPRD DALAM
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD
(Studi di Kabupaten Lampung Utara)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

DEDY SUWARDI
NPM 1421020062

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DPRD DALAM
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD
(Studi di Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi:

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Dedy suwardi
NPM: 1421020062

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I: Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
Pembimbing II: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018**

ABSTRAK

Bentuk Negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagai mana mestinya

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan undang-undang tentang DPRD? Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder sebagai sumber yang utama. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara kepada narasumber yaitu anggota DPRD beserta masyarakat lainnya.

Hasil penelitian data-data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa peran DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD di Lampung Utara masih terbilang lemah, sedangkan pelaksanaan fungsi legislasi telah berjalan baik, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan perannya dalam pengawasan APBD belum berjalan secara optimal.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan mem berikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Dedy suwardi

NPM : 1421020062

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DPRD DALAM
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD (Studi di
Kabupaten Lampung Utara)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H.Khoirul Abror, M.H.
NIP.195704031987031003

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H
NIP. 197408162003122004

Mengetahui

**Ketua jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN
DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD (Studi
di Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Dedy Suwardi, NPM. 1421020062**,
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam
sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada tanggal:
17 Juli 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.H.

Penguji II : Dr.H.Khoirul Abror, M.H.



DR. H. KHORUL ABROR, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.an-nisa' (4): 59)¹



¹ Qur'an Surat .an-nisa' (4): 59

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.
2. Abdul Rahman dan Hayani sebagai bapak dan ibuku tersayang yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada terhenti untuk kesuksesan aku, Kerja keras kalian banting tulang mencari uang demi menyekolahkan anak-anak kalian sampai menjadi sarjana saat ini, mungkin takkan terbalas. Terimakasih bapak ibu atas semua apa yang kalian berikan selama ini. Semoga kalian panjang umur sehat selalu sampai bisa melihat dan bersama aku saat aku sukses nanti.
3. Tete, uni, adin, susi, ayuk. yang selalu menasehati untuk kebajikan
4. Keluarga besar sepupu-sepupuan semua nya.
5. Sahabat terbaik, Haris, Iwan, Ucu, grup family kontrakan, grup puari sungkai.
6. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dedy Suwardi, lahir 12 juli 1996 di Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara. Anak ke-enam dari enam bersaudara merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Abdul Rahman dan Ibu Hayani.

Pendidikan yang pernah ditempuh

1. TK Cinde Laras Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara lulus tahun 2003
 2. SDN 01 Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara lulus tahun 2008
 3. MTS Negeri Padang Ratu Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara lulus tahun 2011
 4. SMAN 01 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara lulus tahun 2014
 5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara)
- 
- A large, semi-transparent watermark logo of Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung is centered in the background. It features a stylized yellow and green emblem with the letters 'UIA' in green, and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG' in a circular arrangement around it. Below the emblem are two purple and blue curved shapes.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)** Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terima kasih ini di berikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah.
4. Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa. dan Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Untuk yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini yaitu sahabat seperjuangan keluarga besar Siyasah'A angkatan'14, wabil khusus untuk Iwan, Haris, Ardi, Yana, Epi, Eca, Reka
8. Keluarga besar KKN 126 Kab. Lampung Selatan. yang telah menemani selama 40 hari
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, 01 november2018
Penulis

Dedy Suwardi
NPM.1421020062

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II DPRD DALAM PANDANGAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF	
A. DPRD Dalam Pandangan Fiqih Siyasah	16
1. Pengertian <i>Ahl-Al-Hall Wa-Aqd</i>	16
2. Dasar hukum <i>Ahl-Al-Hall Wa-Aqd</i> Dalam al-Qur'an	20

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang <i>Ahl-Al-Hall Wa-Aqd</i>	23
B. DPRD Dalam Pandangan Hukum Positif	29
1. Pengertian dan Syarat-Syarat DPRD	29
2. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang DPRD	32
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD	32

BAB III PERAN PENGAWASAN DPRD LAMPUNG UTARA

DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD

A. Gambaran Umum DPRD Lampung Utara.....	35
B. Peran DPRD Lampung Utara dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD.....	47
C. Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Pengawasan APBD.....	59
1. Tugas dan Wewenang DPRD.....	59
2. Faktor dan Penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Lampung Utara	62
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan APBD.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD (studi di Kabupaten Lampung Utara)**”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu diuraikan, antara lain:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Negara yang dijalani suatu Bangsa.³

² Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

³ A. Dijazuli, *fiqh Siyasah*, Prenada Media, Jakarta. 2000, h.42

Peran adalah perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁴

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah, disamping Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. berhubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.⁵

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006).⁶

Pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, dan pengoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin anggaran semua pekerjaan/kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini ialah suatu upaya mengkaji secara ilmiah kita untuk berfikir tentang kinerja DPRD yang lemah dalam melakukan pengawasan karena bagaimana bisa DPRD meloloskan anggaran yang besar ini hanya untuk kepentingan salah satu pihak saja. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab berbagai anggapan miring tentang DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.* h.854

Penelitian ini ingin meneliti dan mengkaji apakah fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan dengan efektif sesuai dengan standar menurut peraturan perundang-undangan dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)”.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul proposal “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Lampung Utara” adalah sebagai berikut:

1. pada permasalahan yang ada pada saat ini peran DPRD terhadap pelaksanaan pengawasan APBD di kabupaten Lampung Utara cenderung kurang terlihat kinerjanya.
2. peran DPRD terhadap pelaksanaan pengawasan APBD dalam pandangan Fiqh Siyasah mengalami peningkatan kesadaran dan wawasan keislaman muslim, karena terlihat kenyataan bahwa penjajahan siyasah yang selama ini berlangsung telah menghancurkan segala milik umat, dan telah muncul suatu kesadaran baru dari kalangan kaum muslimin bahwa siyasah merupakan bagian dari kehidupan lain seperti: ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Hal-hal tersebutlah yang mengacu atau membuat penulis tertarik ingin mengetahui keberagamaan.

C. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sangatlah mutlak diperlukan dalam kehidupan modern ini. Pemerintahan daerah tidak hanya mengatur keperluan-keperluan daerah, tetapi juga menjadi landasan berpijak dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan yang bersifat kedaerahan. Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan.⁷ Pemerintahan yang baik dibutuhkan guna membuat perubahan-perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat. Jika dicermati, definisi Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut : urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁸

Pemerintah Daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan

⁷Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.23

⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (7)

kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.⁹

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan Daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah (1) fungsi, (2) tugas dan (3) wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.¹⁰ Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good local governance* seperti yang diharapkan rakyat.

⁹Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan...*,h.18

¹⁰Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*,(Jakarta: Adeksi, 2004), h.73

Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.¹¹ Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dilengkapi dengan hak-hak khusus yang dapat mendukung efektifitas kerjanya sebagai salah satu lembaga kontrol di Daerah. Hak-hak tersebut seperti hak meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati, hak penyelidikan (angket), hak meminta keterangan (interpelasi), hak perubahan atas rancangan peraturan Daerah, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan rancangan peraturan daerah, hak menentukan anggaran belanja DPRD, dan yang paling penting bahwa dalam penentuan diterima tidaknya Rancangan APBD yang diusulkan oleh eksekutif, DPRD memiliki hak yang sangat besar.

APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi Daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan peran DPRD yang merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara. Oleh

¹¹Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 147

karena itu, perlu diciptakan mekanisme yang mampu mendorong masyarakat untuk merasa memiliki sumber daya. Sehingga mereka pun dapat turut serta bertanggung jawab dalam hal pengawasan. Di era otonomi daerah seharusnya paradigma “membangun daerah” lebih difokuskan. Artinya, daerahlah yang harus mempunyai inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam menyusun, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan daerah.¹²

Indonesia memiliki beragam suku dan kearifan lokal sangat cocok untuk diterapkan otonomi Daerah untuk menunjang perekonomian Daerah khususnya APBD. Kabupaten Lampung Utara, merupakan salah satu cerminan kota yang berkembang dengan mengandalkan pariwisata. Keunikan pengalaman merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai Daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Lampung Utara berproses dari tipe pemerintahan yang paling tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur dan penyelenggaraannya yang lebih dekat dengan demokrasi barat dibanding dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perkembangan ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat. Jika otonomi daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai wewenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi dapat menjadi otonomi masyarakat setempat untuk

¹²Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan ...*, h.77

memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokal demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Sebagai Daerah Kabupaten yang mempunyai Dewan Perwakilan yang terbagi disetiap Kecamatan, makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan DPRD (Legislatif) adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Oleh karena itu, DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dandiarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan Daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPRD sebagai badan legislatif, anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah secara otonom semakin mengemuka, keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. APBD Lampung Utara di tahun 2017-2018 mengalami fluktuasi yang menarik. APBD Kabupaten Lampung Utara tahun 2016-2017 tidaklah banyak mengalami peningkatan. Tetapi di tahun 2018 mengalami peningkatan sangat signifikan. Hal ini tentu saja mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Perda APBD ini kemudian dikaitkan dengan fungsi pengawasan DPRD kabupten Lampung Utara yang berjalan baik atau tidak. Berkaitan dengan pertanggung jawaban bupati tentu saja sangat berperan besar dalam penyusunan dan penetapan APBD. Apakah APBD tahun

¹³Khairul Ikhwan Damanik et.al, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Obor, 2010), h.113.

anggaran 2016-2017 Kabupaten Lampung Utara ini mengalami peningkatan karena setelah di undangkannya Undang-Undang yang menjadi acuan, yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat Peraturan Daerah yang mengatur tentang laporan keterangan pertanggung jawaban tersebut sampai saat ini belum diterbitkan, maka acuan DPRD dan Kepala Daerah tetap mengacu kepada Undang- Undang tersebut. DPRD memiliki tugas antara lain: (a) tugas legislasi, (b) tugas pengawasan, dan (c) tugas anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Demikian juga kekuasaan badan legislatif Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁴

Atas dasar prinsip- prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi, DPRD Lampung Utara sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legeslatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Sementara eksekutif hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan legislatif.¹⁵ Dari uraian diatas, maka dapat di temukan permasalahan bagaimana pengawasan DPRD Lampung Utara terhadap laporan pertanggung jawaban kepala Daerah atas APBD tahun

¹⁴Ali Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 32.

¹⁵Ichlasul Amal, *Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, 1995), h.23.

anggaran 2016-2017. Jika kita lihat dalam negara ini terlihat bahwa, DPRD dalam melaksanakan haknya sebagai implementasi dari tugas legislasinya dalam pelaksanaan otonomi Daerah belum sepenuhnya terealisasi dan sangat kurang bahkan hampir tidak terlaksana sama sekali.

Dalam pemerintahan Islam yang dimaksud dengan DPRD adalah dapat disebut dengan *Ahl-Al-hall Wa-Aqdy* yaitu sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa Majelis Syura yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya.

Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Penelitian ini meneliti dan mengkaji apakah fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan dengan efektif sesuai dengan standar menurut peraturan perundang-undangan dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi Kabupaten Lampung Utara)” dengan demikian dalam skripsi ini akan di titik beratkan pada kajian tentang salah satu fungsi DPRD

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara.

- b. Menganalisis pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk lebih menekankan kinerja DPRD untuk menjalankan peran nya sebagai wakil rakyat guna kepentingan masyarakat.
- b. Untuk lebih mengetahui peran anggota DPRD dalam pandangan Fiqh Siyasah terhadap pengawasan pengelolaan APBD?

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif.

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi kantor DPRD Lampung Utara yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.¹⁶

b. Sifat penelitian

¹⁶Anton Bakker, *metode-metode filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). h. 10.

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *empiris analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*factfinding*) serta menentukan korelasi antara yang satu dan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.¹⁷

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda, pola, sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD yang mengawasi anggaran APBD di Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive sampling* juga disebut dengan *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sample. Oleh karenanya, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar

¹⁷Surtisno Hadi, *metodologi research* (Yogyakarta: fak Psikologi UGM, 1985), h.3

bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian kriteria yang pantas dijadikan sampel pada penelitian ini adalah: anggota DPRD, yang mengawasi anggaran APBD di Lampung Utara. Maka dalam hal ini, penentuan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 sampel yang diambil dari 5 anggota DPRD dan 5 orang dari masyarakat setempat.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah “Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali”. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dalam hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan anggota DPRD, yang mengawasi anggaran APBD di Lampung Utara.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapat dari *literature* dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam

hal ini menggunakan jenis *interview* bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekacuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan. *Interview* ditunjukan anggota DPRD, yang mengawasi anggaran APBD di Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya..¹⁸

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, “menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif. Yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus..¹⁹

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),h.57-66

¹⁹ Soejino Soekanto, *pengantar penelitian* (jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) h.112

BAB II LANDASAN TEORI

A. DPRD Dalam Pandangan Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd*

Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.²⁰ Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.²¹

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl-syura*. pada masa 'Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksituasi Doktrin Politik Islam* (Pena Media Grup Jakarta: 13220). h. 158.

²¹Ibid.

negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-Syura* atau *ahl al-hall wa al-'aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.²²

Berangkat pada praktik yang dilakukan al-Khulaf'aul Rasyidun inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *ahl al-hall wa al-'aqd*. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda yaitu, pertama dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara, kedua pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih, ketiga pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* melalui seleksi dalam masyarakat, keempat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.²³

Ijtihad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami isi kandungan Alquran dan Sunnah yang merupakan sumber baku agama, untuk memahami dan menafsirkan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.²⁴

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Pena Media Grup Jakarta: 13220). h.160.

²³ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.* h. 164-166

²⁴ Hendri k, *pemikiran muhammad iqbal dan pengaruhnya terhadap pembaruan hukum islam*, (jurnal al-'adalah, vol. xii, no. 3, 2015). h. 612.

Al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.²⁵ Dalam hal ini, al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaanya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.²⁶

Beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan ulil amri ketika mereka membahas surah an-Nisa', 4:59,



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.an-nisa' (4): 59)²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid..

²⁷ Qur'an Surat .an-nisa' (4): 59

Dapat kita pahami maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus mentaati Allah SWT serta Rosulnya dan Ulil Amri atau pemimpin di antara kita, ayat ini berkaitan dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*, dalam hukum Islam itu sendiri ulil amri dan *ahl al-hall wa al-'aqd* memiliki makna yang sama terutama dalam melaksanakan kewajiban nya demi kemaslahatan umat.

pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. al-Naisaburi mengatakan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah orang-orang yang terhormat yang berfikir luas. al-Nawawi mengidentikkan sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh, memerinci komponen *ahl al-halwa al-'aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum.²⁸ Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *ahl al-hal wa al-'aqd* kedalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan *ijtihad*, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.²⁹ Menurut al-Mawardi, wewenang *ahl al-hall wa al-'aqd* yang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan agama.³⁰

Dalam sejarah Islam, istilah *ahl al-hall wa al-'aqd* sendiri sebenarnya tidak lahir pada zaman nabi Muhammad SAW ataupun zaman Khulafaur

²⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *tafsir al-manar*, (kairo: maktabah al-khairah, 1960), jilid 5. h. 181.

²⁹ Lihat Fathi Osman, *"the concept for the appointment of the head of an islamic state"*, dalam mumtaz ahmad, *state, politic of islam*, (washington: american trust publication, 1986), h. 60-61.

³⁰ Al-mawardi, *al-ahkam al-sultaniyah*, h. 7.

Rasyiddin, lembaga ini baru muncul ketika zaman Abbasiyah atau Bani Abbas yang berpusat di Kota Baghdad (sekarang ibukota Irak)³¹ pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintahan. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis ini yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara..³² Jadi, daulat Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputus secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam.³³

2. Dasar hukum *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd*

Bila dalam al-qur'an dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *ahl-al-hal wa al-aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substantial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam mereka yang di sebut dengan "ulil amri" dalam

³¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013). h.32.

³² Abudul Aziz Dahlan, et al., *insiklopedi hukum islam*, (jakarta: ichtiar baru van hoeve, 1995), jilid 4 h. 1063.

³³ Ibid, h. 1061.

firman allah SWT: taatilah allah dan taatilah rosul(nya),dan ulil amri di antara kamu Seperti yang di jelaskan di bawah.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS.an-nisa' (4): 59)³⁵

Juga dalam firman-Nya dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka rasul dan ulil amri

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا

قَلِيلًا (٨٣)

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri. di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut Syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu). (QS.an-nisa' (4): 83)³⁶

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan umat dalam firman-nya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang

³⁴Farid abdul kalid. *Fikih politik islam* (sinar grafika offset: jakarta 13220.). h.83.

³⁵Qur'an Surat .an-nisa' (4): 59

³⁶Qur'an Surat .an-nisa' (4): 83

menyeru kepada kebajikan , menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imran (3):104)³⁷

Dengan demikian, fikih politik islam telah menciptakan suatu bentuk musyawarah dimasa awal timbulnya *Daulah Islamiah* di madinah, Nabi Muhammad SAW, sebagai mana ia juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi madinah.

Dengan demikian, ia juga telah menciptakan satu prinsip “sesuai undang – undang” dalam komunikasi politik, salah satu prinsip terpenting yang ditetapkan oleh Islam di bidang konstitusional politik, yang belakangan ini di kenal dengan ilmu politik barat dan membuat beberapa gambaran penetapan nya.

Ilmu politik barat telah mendahului kita sampai kepada suatu yang seharusnya kitalah yang lebih dahulu sampai kepadanya, daripada beragam sistem kehidupan , umumnya sistem politik, khususnya-seandainya kita tidak tertimpa kelemahan dan keterbelakangan di segala bidang kehidupan.³⁸

Bentuk musyawarah itu tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* atau dewan perwakilan rakyat ahlul ikhtiar di kenal Islam, yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendikiawan mereka serta

³⁷Qur'an Surat. Al-imran (3):104

³⁸Farid abdul kalid. *Fikih politik islam* (Sinar Grafika Offset: Jakarta 13220.). h.82

keiklasan mereka, juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum hukum yang di perlukan.³⁹

3. Tugas, dan wewenang *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd*

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum menurut penulis *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah ahlul ikhtiar dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusiaonal dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.⁴⁰

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah sebagai berikut:

1. Tugas *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan *baiat in'iqad* kepada khlifah. Imam Al-Mawardi berkata jika *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* telah berkumpul untuk memilih maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan immamah (khalifah) yang memenuhi seluruh persyaratan. Mereka harus mendahulukan yang banyak kelebihan-nya,

³⁹ lihat: Tafsir al-Manar, Sayyid Rasyid Ridha, jus 5, h. 154.

⁴⁰Frenki, "*Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*", (Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.35.

yang paling sempurna persyaratan-Nya, dan yang paling segera di taati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya”

2. *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlu Al-Sulthah Al-Tasyriah tersebut diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa, mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping itu, ijtihad anggota legislatif atau *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih dandaf al-malfasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan) ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil perturan yang akan di undangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁴¹

Menurut Khalid ali Muhammad al-Anbari, ulil amri termasuk dalamnya *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* memiliki enam macam tugas sebagai berikut:

1. Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi:
 - a. Mengembangkan ilmu-ilmu agama
 - b. Menghormati ahli-ahli ilmu agama.
 - c. Meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum dalam menyangkut masalah keagamaan.

⁴¹Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taquddum, 1397 H/1977 M), h.59.

- d. Memberantas *bid'ah* dan mengambil tindakan undang-undang sesuai hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk memelihara agama dari pada kecacatan dan melindungi umat Islam dari kesesatan.
 - e. Mendukung tegaknya syariat-syariat Islam, misalnya memberikan dukungan untuk dikumandangkannya adzan dan iqomah di berbagai masjid dan mushola sebagai menandakan telah masuknya shalat lima waktu.
 - f. Menjadi imam shalat.
 - g. Menyampaikan khotbah.
 - h. Menentukan pemulaan akhir dan akhir pelaksanaan ibadah puasa.
 - i. Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
2. Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Berjihad menentang kaum musyrikin yang memusuhi Islam.
 - b. Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh termasuk menetapkan gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga para tentara yang bergabung dalam angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gaji yang diterima.
3. Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Menegakan keadilan dan menumpas kezaliman.
 - b. Melaksanakan hudud (hukum) syariah agar segala larangan Allah tidak di perolok-olok dan hak-hak manusia tidak di langgar.

- c. Memisahkan kekuasaan eksekutif dari pada kekuasaan yudikatif dengan melantik dan hakim yang mampu mengemban tugas agar mencegah tidak terjadinya pertikaian dan kedzaliman sehingga semua pihak, baik pihak yang kuat maupun pihak yang lemah, ataupun pihak yang hina maupun pihak yang mulia memiliki kedudukan setara di mata hukum.
4. Tugas di bidang keuangan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Memungut dan mendistribusikan zakat, jizyah, fai, dan kharaj.
 - b. Memberi perhatian kepada harta-harta yang di wakafkan untuk tujuan kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
5. Tugas di bidang pemerintahan negara, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Memilih mereka yang berkelayakan untuk melakukan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kaum muslimin dan orang banyak. Sehingga tugas yang di percayakan kepadanya dapat dilakukan dengan baik.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat, sehingga dapat segera diketahui jika ada pihak-pihak tertentu melakukan penghianatan atau penipuan.⁴²

Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi menyatakan tugas ulil amri yang termasuk dalamnya *Ahl-Al-Hall Wa-Aqdada* sepuluh macam yaitu:

1. Mempertahankan dan memelihara agama.

⁴²Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani, *Huquq al-Insan wa Hurriyatuh al-Assasiyah fi al-Nizam al-Islami wa al-Nuzhum al-Mu'ashirah* (Mathabi al-Jami'iyah al-Mulkiyyah, 1400 H/1980 M), cet. 1, h.611.

2. Menegakan hukum-hukum dan keadilan pada pihak-pihak yang berperkara.
3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.
4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan .
5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
6. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang menghadapi Islam.
7. Memungut zakat, dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.
8. Mengatur penggunaan harta bayt al-mal (kas negara) secara efektif
9. Melantik orang yang jujur dan berkualitas guna mengurus dan menjaga keuangan negara.
10. Memantau pekerjaan dalam rangka membangun negara dan menjaga agama.⁴³

Berdasarkan pandangan-pandangan para pakar hukum tata negara dalam Islam tersebut di atas dapat penulis tegaskan bahwa tugas pokok *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih Khalifah, serta mengawasi segala kebijakan sesuai dengan syari'at Islam, mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan syariat Islam.

kewenangan kelembagaan negara legislatif yang dalam hal ini *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah:

⁴³ Al-Mawardi.Op.Cit., h. 26

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Menegakan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan hadis.
 - b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
 - c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, selama tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.
3. Memilih dan membai'at khalifah. *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* berwenang memilih dan membai'at khalifah yang tugasnya meminta pertanggungjawaban khalifah.
4. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah. *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara.⁴⁴

Tugas dan wewenang *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, niscaya akan selalu terpelihara hubungan baik vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Terpelihara dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik

⁴⁴ Frenki, "Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam", (Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 9-10.

pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.

B.DPRD Dalam Pandangan Hukum Positif

1. Pengertian dan Syarat-syarat DPRD

Dewan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga tertinggi negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat.⁴⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara selanjutnya disebut sebagai DPRD Lampung Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ditingkat Kabupaten Lampung Utara.

Adapun Syarat-syarat DPRD seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014, bagian kesatu tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) menulis syarat-syarat bakal calon anggota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. cakap berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia

⁴⁵Kansil, C. S. T., Kansil, Cristine C. S. T. *Sitem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4. (Jakarta: Bumi Aksara , 2011) h.83.

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif
- j. terdaftar sebagai pemilih
- k. bersedia bekerja penuh waktu⁴⁶
- l. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota
 - 2) Kepala Desa
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi

⁴⁶ C. S. T., Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Ranika Cipta, 2008) h.267.

dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan

4) Aparatur Sipil Negara

5) anggota Tentara Nasional Indonesia

6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas

n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik

- Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- p. menjadi anggota partai politik.
 - q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan
 - r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik
 - s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
 - t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

2. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴⁷

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota

DPRD mempunyai tugas:

- a. Pengawasan, Legislasi, Perencanaan Anggaran

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah

⁴⁷ C. S. T., Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Ranika Cipta, 2008) h.149.

- b. anggaran kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- c. pengawasan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Ketiga fungsi sebagaimana dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten/Kota.⁴⁸

Bagian Wewenang dan tugas Pasal 366

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah

⁴⁸undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 365 ayat (1)

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

⁴⁹Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 366 ayat (1)

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum DPRD Lampung Utara

Sebagai Negara demokrasi yang berdasarkan pancasila maka sarana azas pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). dan terbentuklah DPRD Kabupaten tingkat II Lampung Utara periode 1977-1982 yang berkantor di alamat Jl. Perwakilan Nomor 01. Kotabumi, dan pada tahun 1992 berpindahlah ke alamat Jalan Soekarno-Hatta No 01 Kotabumi. Semenjak masa orde baru pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak 10 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 Pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Kabupaten Lampung Utara, tercatat kedalam 4 Daerah pemilihan dari setiap Kecamatan (dapil) yaitu dapil 1 (satu) Kotabumi, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan Dapil 2 (dua) Kecamatan Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Muara Sungkai, Kecamatan Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Hulu Sungkai, Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Barat. Dapil 3 (Tiga) Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Blambangan Pagar. Dapil 4 (Empat). Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Abung Barat, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Abung Tinggi, Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Abung Kunang. Berikut data daerah pemilihan Kabupaten Lampung periode 2014-2019

Tabel.daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara

NO	DAERAH PEMILHAN	JUMLAH PENDUDUDUK	JUMLAH KURSI
1.	Dapil 1 meliputi: Kotabumi Kotabumi utara Kotabumi selatan	70.832 41.569 70.869	11
2.	Dapil 2 meliputi: Sungkai selatan Sungkai utara Muara sungkai Bunga mayang Hulu sungkai Sungkai tengah Sungkai jaya Sungkai barat	28.953 42.956 18.307 45.695 20.543 24.139 14.433 19.115	12
3.	Dapil 3 meliputi: Abung timur Abung selatan Abung semuli Abung surakarta Blambangan pagar	43.415 55.741 37.775 29.442 18.634	11
4.	Dapil 4 Bukit kemuning Tanjung raja Abung barat Abung tengah Abung tinggi Abung pekurun Abung kunang	53.558 43.091 21.050 22.096 23.426 19.923 15.384	11
	JUMLAH	780.937	45

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten lampung utara.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD diwajibkan menjadi salah satu anggota komisi. Penempatan anggota DPRD dalam Komisi diputuskan dalam rapat pimpinan atas usul fraksi dan dilakukan setiap awal tahun anggaran. Jumlah komisi DPRD periode 2014-2019 yang ada di Kabupaten Lampung Utara berjumlah 4 (empat) komisi sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel: komisi dan bidang tugas DPRD Lampung Utara

NO	KOMISI DAN JABATAN	NAMA	BIDANG TUGAS
1.	Komisi I Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota	Guntur Laksana, Skm Yunizar, Se Sofian Toni, A.Md Hj. Elli Yana H. M. Herry Syarifudin, Se.Mm Rendy Apriansyah, Se., Mm Syamsu Nurman, Se. Drs. Tri Purwo Handoyo Madi Daud, Se H. Haspawi Syabirin	-pemerintahan -keamanan dan ketertiban -kependudukan dan transmigrasi -penerangan dan pers -hukum perundang-undangan dan HAM -kepegawaian dan aparatur -perizinan -sosial politik -organisasi masyarakat pertahanan/pertanahan
2.	Komisi II Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota	Wansori, SH. H. Rico Picyono, SE Anjasmara Ria Kori Rafles Susanto, SH H. Alamsyah, SE Johan Syafiri Drs. Santosa Hamin	-perdagangan, dan perindustrian -pertanian, perikanan, peternakan -kehutanan dan perkebunan -pengadaan pangan -koperasi dan dunia usaha -pariwisata -keuangan dan aset daerah -pendapatan asli daerah

		Muhammad Yani H. M. Mukhlis	-perbankan -perusahaan daerah -penanaman modal -pasar
3.	Komisi III Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota	Joni Saputra Asnawi Emil Kartika Chandra Agustori Herwan Mega,SE Agus Suprianto Dedy Andrianto,S.Pd.Kor Ali Darmawan,S.Sos Helda Maria Amir Yusmeri Rahmad Fadli, SH.	-pekerjaan umum -tata ruang -perhubungan -sumberdaya alam dan energi -perumahan rakyat -lingkungan hidup -ilmu pengetahuan dan teknologi
4.	Komisi IV Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota	Yordan Bangsaratoe, SE. Febriansyah,S.Sos Joni Bedyal Jupri Sunandar, A.Md Drs.H. Toyo Siswanto Agung Utomo Triyono,SE. Hj. Sandy Juwita,S.Pd.,MM H. Ruslan Effendi Muhizar	-Ketenagakerjaan -pendidikan -pemuda dan olah raga -agama -kebudayaan -kesejahteraan sosial -kesehatan dan keluarga -peran wanita -HIV,AIDS,badan,narkotika daerah

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara

dari 45 anggota serta di dampingi sekretaris dewan (sekretaris bukan anggota) dari 8 fraksi yang ada yaitu fraksi PDIP, fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Nengah Nyamppur, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS berikut susunan fraksi dalam bentuk tabel:

Tabel. Susunan Dan Komposisi Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Utara

NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
1.	PDIPerjuangan	Joni saputra Muhlizar Jupi sunandar, A.Md H. Rachmat Hartono Agustari Elli yana H.Rico Picyono,SE	Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Gerindra	Helda Maria Sofian Toni,A.Md Muhammad Yani Madri Daud, SE. Hj. Sandy Juwita,S.Pd.,MM Nurdin Habim, SE. Amir Yusmeri Rafles Susanto, SH	Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	Demokrat	Wansori, SH. Joni Bedyal M. Yuzrizal, ST. Herwan Mega SE. Ria Kori Dedy Andrianto,S.Pd.Kor Rendi Apriansyah	Ketua Wk. Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4.	Golkar	Arnol, SH. H.M. Muklish Rahmad Fadli, SH. H.Ruslan Effendi H. Haspawi Syabirin	Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota Anggota
5.	PKS	Agung Utomo H. Alamsyah Drs. Try Purwo Handoyo Agus Suprianto	Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota
6.	PKB	Emil Kartika Candra Anjasmara Febriansyah,S.Sos.	Ketua Wk. Ketua Sekertaris

		Syamsyu Nurman, SE	Anggota
7.	PAN	Yordan Bangsaratoe, SE. Yunizar Asnawi Drs.H. Toyo Siswanto	Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota
8.	Restorasi	Ali Darmawan,S.Sos Drs. Santosa Hamin H. M. Herry Syarifudin, SE.MM Johan Syafiri Triyono,SE. Guntur Laksana,SKM	Ketua Wk. Ketua Sekertaris Anggota Anggota Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan tugasnya harus sesuai aturan yang berlaku yaitu harus menghormati dan mentaati tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara. Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara merupakan aturan baku yang telah ditetapkan oleh ketua DPRD sebagai ketentuan yang harus dihormati dan ditaati oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara kode etik DPRD Kabupaten Lampung Utara adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. masyarakat berhak menilai sikap dan perbuatan anggota DPRD, jika ada perbuatan anggota yang kurang baik, masyarakat berhak melaporkannya ke Badan Kehormatan DPRD Lampung Utara untuk ditindaklanjuti. Keterangan mengenai beberapa hal yang telah diatur oleh Tata Tertib Kabupaten Lampung Utara bisa disimak seperti di bawah ini:

1. Tugas ketua DPRD lampung utara

Menurut peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara dan mengacu pada UU No 27 tahun 2009 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil-wakil ketua
- c. melakukan koordinasi dan upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
- d. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna
- e. menjadi juru bicara DPRD
- f. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD
- g. mengadakan konsultasi dengan Bupati/pemerintah daerah dan instansi pemerintah lain sesuai dengan putusan DPRD
- h. mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan
- i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD. Pelaksanaan tugas Pimpinan dilakukan secara kolektif.

Jika ketua berhalangan dalam melakukan tugasnya karena alasan tertentu dan dalam jangka waktu yang relatif singkat maka tugasnya dapat diwakilkan

kepada Wakil Ketua. Jika Ketua berhalangan dalam jangka waktu lebih dari 30 hari maka pimpinan partai politik menggantikan wakilnya yang duduk sebagai Ketua DPRD dengankadernya yang lain.

2. Badan musyawarah

DPRD Lampung Utara memiliki yang namanya Badan Musyawarah yang merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separo jumlah anggota DPRD. Di Kabupaten Lampung Utara, Badan musyawarah yang ada terdiri dari 15 orang anggota DPRD keterwakilan dari seluruh Fraksi yang ada.

Badan Musyawarah yang mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak diminta kepada pimpinan DPRD
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat
- d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan
- e. merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada badan musyawarah
- f. meminta dan atau memberi kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberi keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.

3. Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap, dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi DPRD. Anggota badan legislasi daerah di usulkan masing-masing fraksi dengan perbandingan 1 (satu) orang mewakili 5 (lima) orang anggota dengan 3 (tiga) orang anggota atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).

Badan Legislasi Daerah Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas, rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d. Melakukan pegharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah

- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus.
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan/dijadwalkan oleh badan musyawarah dan untuk dikonsultasikan
- h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan
- i. Mengundang Bupati Kabupaten Lampung Utara dan masyarakat dalam melakukan pengkajian dan penelaahan atas rancangan peraturan daerah melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara
- j. Meminta penjelasan dan masukan dari Bupati, pakar dan masyarakat berkenaan dengan pengkajian dan penelaahan atas rancangan peraturan daerah

4. Badan Anggaran

Badan anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Masa keanggotaan badan anggaran dapat ditinjau pada setiap tahun anggaran.

Badan anggaran DPRD Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, lima bulan sebelum ditetapkan APBD, berupa pokok-pokok pikiran DPRD

- b. memberikan saran dan pendapat kepada kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna
- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD

5. Badan Kehormatan

Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Utara yang bersifat tetap, yang memilih dari dan oleh anggota DPRD, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Badan kehormatan DPRD Kabupaten Lampung Utara terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan seorang anggota.

Badan kehormatan mempunyai tugas :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih

- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

6. Alat Kelengkapan Lainnya

Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan antara lain panitia khusus/panitia kerja dengan keputusan DPRD, atau usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna. Panitia khusus atau panitia kerja merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang anggotanya terdiri dari anggota komisi terkait yang mewakili semua fraksi yang ada dan bertugas membahas hal-hal yang dianggap khusus yang diselenggarakan untuk keperluan itu.

B. Peran DPRD Lampung Utara dalam pengawasan pelaksanaan APBD

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu memberikan gambaran yang jelas terutama tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai target sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar

dapat dirasakan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik.

Peranan DPRD dalam pembuatan APBD meliputi tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pertanggung jawaban serta pengawasan. Tahap pengawasan inilah yang penting yang harus diperhatikan oleh DPRD, karena tahap ini dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggung jawaban. Pengawasan terhadap APBD ini penting agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh APBD. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan anggaran daerah oleh DPRD sejak dini dapat dilakukan, yaitu mulai pembahasan RAPBD. Untuk lebih memperjelas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017-2018.

Berikut Penulis jelaskan mengenai tatacara pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara dan petikan wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang mewakili suara Fraksi nya.

Menurut **Santosa Hamin** Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Fraksi Restorasi dan selaku anggota komisi III yang menanganai salahsatunya di bidang keuangan dan aset daerah menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan APBD dapat digolongkan seperti tahap pengawasan pada saat perencanaan atau penyusunan APBD oleh tim anggaran pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, Pengawasan pada saat APBD di jalankan oleh kepala daerah

dan SKPD,serta Pengawasan pada saat pelaporan penggunaannya oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Lampung Utara.⁵⁰

1. Tahapan Pengawasan Terhadap Perencanaan APBD

Penyusunan APBD Kabupaten Lampung Utara Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam penyusunan APBD dilaksanakan pada saat RAPBD di ajukan oleh kepala Daerah. DPRD Kabupaten Lampung Utara mempunyai peran yang nyata dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan APBD terlebih lagi di dukung oleh fungsi DPRD yang lain yaitu fungsi anggaran, yang mana DPRD bersama pemerintah daerah terlibat bersama dalam penyusunan APBD. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, **Asnawi** selaku anggota DPRD Wakil Ketua dari fraksi PAN dan selaku Komisi III yang memiliki tugas di bidang pekerjaan umum dan ilmu pengetahuan dan teknologi. kepada penulis, seperti dikutip dibawah ini :

“ Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada UU. No. 32 tahun 2004, dimana pemerintah daerah secara bersama-sama DPRD menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah “⁵¹

Undang Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dengan Santosa Hamin selaku anggota komisi III di desa Gedung Batin Tanggal 09 oktober 2018, jam 15.15 WIB di rumah kediaman bapak. Santosa Hamin Desa Gedung Batin

⁵¹ Wawancara dengan Asnawi selaku anggota DPRD komisi III di desa Kota Ngeara Tanggal 09 oktober 2018, jam 09.15 WIB di rumah kediaman bapak Asnawi Desa Kota Negara

- a. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD
- b. Berdasarkan arah dan kebijaksanaan umum APBD, Pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- c. Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah daerah menyiapkan RAPBD.
- d. Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib yang ada.

Lanjut **Asnawi** menambahkan “Dengan keterlibatan anggota DPRD dalam pembahasan anggaran membuka peluang besar bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap anggaran yang benar-benar ditujukan untuk program pro-rakyat penyusunan APBD yang diajukan oleh pemerintah, kita sebagai pengawas meninjau porsi anggaran yang diberikan oleh pemerintah, apakah telah sesuai aturan atau belum, jika ada porsi yang tidak sesuai tentu akan kita tindak lanjuti”.

2. Pelaksanaan pembahasan APBD Kabupaten Lampung Utara

Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara antara lain dengan melalui rapat-rapat kerja dengan SKPD. Hal ini diutarakan oleh **Febriansyah**, anggota DPRD komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang menyatakan bahwa

“ Pembahasan APBD di legislatif telah ditetapkan menurut perundangan yang berlaku, kita ada badan anggaran yang membidangi masalah anggaran, termasuk didalamnya masalah APBD, Semua perencanaan keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD dibahas oleh badan anggaran yang merupakan representasi dari semua Fraksi. Dari Banggar, semuanya juga berpulang lagi kepada suara Fraksi dalam memberikan pandangan umumnya di banggar”⁵²

Jadi hasil pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan anggaran yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Utara akan diteliti dan dicermati oleh setiap fraksi-fraksi DPRD Lampung Utara agar tidak pengalokasian RAPBD secara sepihak oleh badan anggaran.

Peran DPRD terhadap pelaksanaan pengawasan APBD yang terakhir dengan menggelar rapat kerja dengan eksekutif menggelar rapat kerja dengan eksekutif dalam rapat komisi dan rapat gabungan komisi 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun. Pengertian rapat komisi ialah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi, sedangkan pengertian rapat gabungan komisi ialah rapat gabungan komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan dengar pendapat dalam rapat dengar pendapat ini dihadiri antara lain oleh DPRD/ Komisi / Panitia khusus dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu pimpinan DPRD dapat pula mengundang lembaga/badan / organisasi kemasyarakatan untuk turut hadir mengikuti dengar pendapat dengan kapasitas sebagai pemantau independen.

⁵²Wawancara dengan Febriansyah, anggota DPRD komisi IV di Kel.Sukarame, Bandar Lampung Tanggal 11 oktober 2018, jam 20.25 WIB di rumah kediaman bapak Febriansyah, S.Sos Kel.Sukarame, Bandar Lampung

Menurut bapak **Guntur Laksana**, dari Fraksi restorasi sekaligus ketua komisi I, ketika memintaketerangannya, beliau menyatakan bahwa:

“ Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dilaksanakan denganmelakukan monitoring. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukanbaik secara formal melaui rapat dengar pendapat dengan instansi terkaitmaupun secara informal seperti dialog dan kunjungan ke masyarakat,pelaksanaan reses.”⁵³

Saya juga mewawancarai Bapak **Muhlizar** wakil ketua dari Fraksi PDIP menyatakan “Dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan, pemerintah daerah secaraberkala menyerahkan laporan realisasi APBD triwulanan kepada anggota DPRD.Tentu saja, laporan ini dapat memberikan informasi yang banyakdan relevan kepada DPRD untuk pengawasan”⁵⁴

Selain mewawancarai anggota DPRD dalam pengawasan APBD di Lampung Utara kami juga mewawancari masyarakat yang dalam hal ini yang merasakan langsung dampak dari pengawasan DPRD dalam kemajuan Kabupaten Lampung Utara guna kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara khusus nya.

Kabupaten Lampung Utara terdiri dari beberapa kecamatan kami mengambil sampel wawancara terhadap 5 anggota masyarakat Kabupaten Lampung Utara bertepatan di Kecamatan Sungkai Utara yang lokasi nya sudah cukup jauh dari perkotaan menurut yang saya kutip dari Bapak **Tajudin**

⁵³Wawancara dengan Guntur Laksana’ anggota DPRD komisi I di Kotabumi Lampum Utara 08 oktober 2018, jam 09.11 WIB di kantor DPRD Lampung Utara

⁵⁴ Wawancara dengan Muhlizar wakil ketua dari Fraksi PDIPDi Negara Ratu, Sungkai Utara 09 oktober 2018, jam 08.30 WIB di rumah kediaman bapak Muhlizar di Negara Ratu, Sungkai Utara

BR. Selaku tokoh masyarakat di Sungkai Utara menyatakan “Peran DPRD dalam pengawasan APBD masih belum cukup terlihat kinerjanya sebab masih banyak kendala-kendala yang ditemui contoh nya masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan, sebab kurangnya perusahaan-perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja khususnya di Kecamatan Sungkai Utara.”⁵⁵

Selanjutnya saya mewawancarai Bapak **Tjik Aman** selaku tokoh pemuka agama, ia menyatakan “Peran DPRD dalam pengawasan APBD di Lampung Utara masih banyak ketimpangan sebab pemerataan pembangunan di setiap daerah khususnya di Sungkai Bunga Mayang ini masih banyak daerah-daerah yang kurang diperhataikan oleh mereka padahal mereka juga tinggal di daerah sini tetapi mereka tidak peduli akan jalan-jalan yang rusak bahkan mereka seperti acuh saja saat melewati jalan-jalan tersebut”.

Pernyataan dari tokoh pemuda pemudi Lampung Utara yang hal ini di sampaikan oleh **Haryadi Pranata** peran DPRD dalam pengawasan APBD sudah berjalan cukup baik hal ini dilihat dari sosialisai kepada pemuda pemudi Sungkai Utara khususnya guna mensoasialisasikan tentang bahaya narkoba dll.⁵⁶

Berkaitan dengan masyarakat hal, kami juga mewawancarai Bapak **Raja Lama** selaku tokoh adat Sungkai Utara. Ia menerangkan peran DPRD dalam pengawasan APBD sudah berjalan baik sebab pemerintah dalam hal ini sudah berkontribusi banyak dalam melestarikan adat budaya Lampung dalam bentuk

⁵⁵Wawancara dengan Tajudin BR. Selaku tokoh masyarakat di sungkai utara. 09 oktober 2018, jam 09.11 WIB di rumah kediaman bapak Tajudin BR. di Negara Ratu, Sungkai Utara

⁵⁶Wawancara dengan Haryadi Pranata Selaku tokoh pemuda-pemudi di sungkai Utara. 09 oktober 2018, jam 09.11 WIB di Kantor Camat Sungkai Utara

dukungan seperti memfasilitasi di saat masyarakat ingin mengadakan acara-acara adat.

Yang terakhir kami mewawancarai masyarakat pemilik usaha kecil menenangkan Ibu **Indrawati**, ia menyatakan untuk saat ini peran DPRD dalam pengawasan APBD di Lampung Utara masih belum terlihat sebab masih mahalnya bahan-bahan pokok yang ada di Lampung Utara ini yang masih sulit di dapat adapun barangnya itu masih relatif mahal untuk di beli bagi sebagian usaha kecil dan menengah.

Demikian hasil wawancara saya dengan masyarakat kita sebagai masyarakat Lampung Utara khususnya harus memperhatikan dan mengawasi anggota dewan kita sebagai wakil kita di pemerintahan kita harus ikut langsung dalam mengawasi kinerja mereka guna kepentingan bersama, sebab uang yang mereka kelola itu hasil dari rakyat yang diperuntukan untuk rakyat.

Selain itu ada suatu yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan anggota DPRD Lampung Utara dalam melaksanakan tugas nya yaitu kesekretariatan DPRD.

Profil umum sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Lampung Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk dengan peraturan daerah yang berfungsi untuk menyelenggarakan administrasi Pemerintah Daerah di bidang pengurusan kesekretariatan DPRD . Sejarah sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara ini tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Utara. Terbentuknya Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai hasil dari suatu proses yang panjang, yang dirintis para

tokoh, dan para pejuang daerah agar kewedanan Kotabumi dapat di tingkatkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara. Penetapan batas cakupan wilayah Lampung Utara ditetapkan dengan residen Lampung dengan nomer 304 pada tanggal 15 Juni 1946 dengan terbitnya Undang-Undang Darurat no 04 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (lembaran negara tahun 1956 nomer 55, tambahan Lembaran Negara nomer 1091) jo Undang-Undang nomer 28 tahun 1959 (lembaran negara tahun 1959 nomer 73, tambahan lembaran negara nomer 1821) disebutkan bahwa Lampung Utara dengan nama Kabupaten Lampung Utara.

1. Visi dan Misi

Visi menjadi sekretariat DPRD yang mampu memberikan pelayanan secara profesional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas-tugas DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Misi meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat, meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

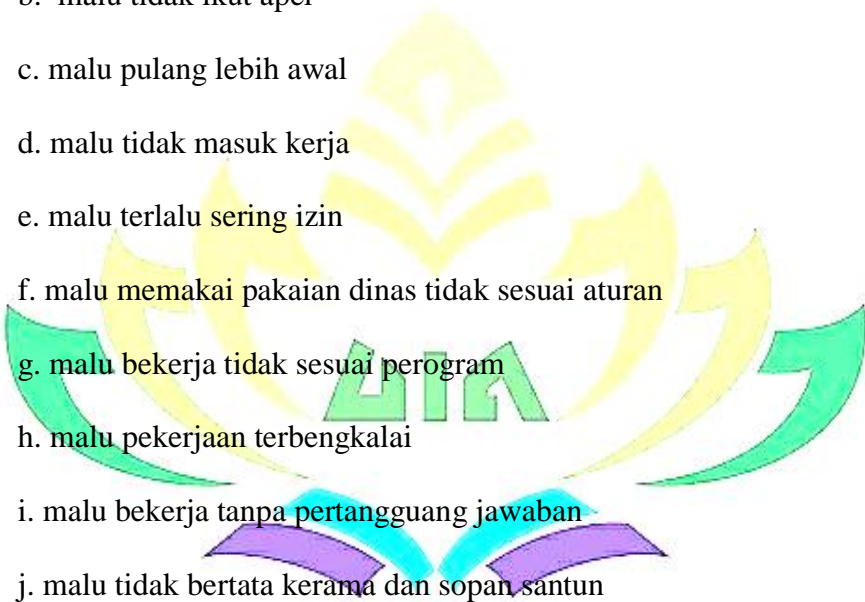
2. Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara dipimpin oleh seorang sekretaris, yaitu pejabat setingkat Eselon II/b di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Dalam perjalanan nya sekretariat DPRD Lampung Utara telah mengalami pergantian sekretaris. Saat ini sekretaris DPRD Lampung Utara di jabat oleh bapak Ir.H.Azwar Yazid, MM yang di tetapkan dengan

keputusan Bupati Lampung Utara nomor: 821.21/66/II/31-LU/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan struktural Eselon II/b di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

3. Budaya Organisasi Formal / Informal

Budaya organisasi Formal yang ada Di Kabupaten Lampung Utara khusus nya pegawai adalah:

- 
- a. malu datang terlambat
 - b. malu tidak ikut apel
 - c. malu pulang lebih awal
 - d. malu tidak masuk kerja
 - e. malu terlalu sering izin
 - f. malu memakai pakaian dinas tidak sesuai aturan
 - g. malu bekerja tidak sesuai program
 - h. malu pekerjaan terbengkalai
 - i. malu bekerja tanpa pertanggung jawaban
 - j. malu tidak bertata kerama dan sopan santun

Budaya organisasi Informal yaitu program prioritas daerah terwujudnya Kabupaten Lampung Utara yang aman, maju, agamis dan bermartabat.

- a. Keamanan, meningkatkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melalui fungsionalisasi kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling)

- b. Kesehatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian “pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat”
- c. Pendidikan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelaksanaan program wajib belajar selama 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun secara gratis dan berkualitas
- d. Infra struktur meningkatkan kelancaran mobilitas seseorang, barang dan jasa serta sentra-sentra produksi ke sentra-sentra distribusi, dan atau kawasan pedesaan ke kawasan perkotaan , melalui peningkatan kapasitas dan struktur perkerasan jalan kabupaten dan poros jalan desa.
- e. Ekonomi meningkatkan pendapatan perkapita melalui perkuatan supra dan infra struktur ekonomi kerakyatan fokus pada pertanian, perternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan melalui pemberian bibit gratis dan menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- f. Lingkungan hidup peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, demi generasi kini dan generasi mendatang, melalui permasyarakatan perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah terhadap lingkungan.
- g. Agama, peningkatan kualitas peran serta tokoh-tokoh agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, guna menunjang kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

- h. Tata kelolaan pemerintahan, peningkatan kualitas kompetensi aparatur pemerintahan daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima terhadap masyarakat (*good governance and clean government*).

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara di bentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Utara nomor 1 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Utara yang berpedoman pada Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 130 tahun 1978 tentang pedoman susunan tata kerja sekretariat wilayah / daerah tingkat II, sekretariat Kota Madya daerah tingkat II dan sekretarian daerah DPRD tingkat II. Pada tahun 1985 peraturan itu mengalami perubahan dengan disahkannya peraturan Daerah Kabupaten Daerah tngkat II Lampung Utara nomor 1 tahun 1985 seiring dengan perkembangan jaman, peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara sering mengalami perubahan secara berturut turut yaitu : Perda nomor 04 tahun 1988 tentang pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah daerah tingkat II dan sekretariat DPRD tingkat II Lampung Utara, Perda nomor 02 tahun 1992 tentang struktur organisasi sekretariat pemda dan sekretariat DPRD tingkat II Lampung Utara, perda nomor 09 tahun 2003, Perda nomor 07 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Perda nomor 09 tahun 2009 tentang organisasi perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Perda nomor 21 tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Sekretariat DPRD Lampung Utara juga memiliki tugas pokok sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Utara. Terbentuknya sekretariat DPRD Lampung Utara juga tidak lepas dari terbentuknya DPRD tingkat II atau DPRD Kabupaten Kota pada tahun 1969 terbitlah undang-undang nomor 16 tahun 1969 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang nomor 05 tahun 1975. Peraturan pemerintah nomor 02 tahun 1976 juga mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tersebut. Melalui putusan menteri dalam negeri nomor 238 tahun 1977 di atur tentang tata cara peresmian dan pemberhentian anggota DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II, dan terbentuklah DPRD Kabupaten tingkat II Lampung Utara periode 1977-1982 yang berkantor di alamat Jl. Perwakilan Nomor 01. Kotabumi, dan pada tahun 1992 berpindahlah ke Alamat Jalan Soekarno-Hatta No 01 Kotabumi.

Sekretariat DPRD Lampung Utara terdiri dari 45 anggota DPRD, Pertama ketua DPRD, kedua Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan 41 anggota serta di dampingi Sekretaris Dewan (sekretaris bukan anggota) dari 8 fraksi yang ada yaitu fraksi PDIP, fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Nengah Nyamppur, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS. ⁵⁷

C. Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Pengawasan APBD

1. Tugas dan Wewenang DPRD

- a. membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

⁵⁷ Bagian umum sekretariat DPRD Lampung Utara

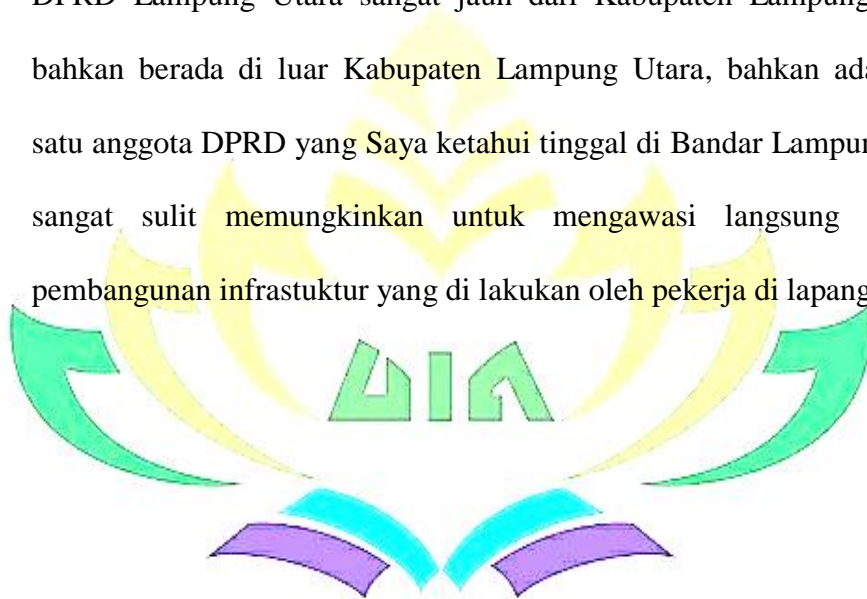
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD

- a. Faktor penghambat yang berasal dari dalam DPRD Kabupaten Lampung Utara sendiri, misalnya banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan bukan menjadi prioritas utama bagi anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara
- b. Dalam wawancara saya dengan **Asnawi** selaku anggota DPRD Wakil Ketua dari fraksi PAN menurutnya faktor penghambat yang utama dalam pelaksanaan pengawasan yaitu dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Kabupaten Lampung Utara mengalami keterbatasan fasilitas ataupun peralatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. sehingga kelancaran aktifitas fungsi pengawasan menjadi tidak lancar dan tidak maksimal.
- c. Kondisi keterbatasan kualitas anggota yang ada pada internal lembaga, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih lemah, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.
- d. Minimnya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh para anggota, khususnya di bidang administrasi birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi dan rekapitulasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh

Kepala Daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran belum jeli dan kurang cermat.

- e. selain dari anggota DPRD pendapat Bapak Tajudin BR. selaku tokoh masyarakat ada juga Faktor penghambat yang datang dari luar lembaga legislatif DPRD Kabupaten Lampung Utara seperti misalnya keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- f. Faktor penghambat yang lain nya semisal jarak lokasi kediaman anggota DPRD Lampung Utara sangat jauh dari Kabupaten Lampung Utara bahkan berada di luar Kabupaten Lampung Utara, bahkan ada salah satu anggota DPRD yang Saya ketahui tinggal di Bandar Lampung, jadi sangat sulit memungkinkan untuk mengawasi langsung kinerja pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pekerja di lapangan.



BAB IV **ANALISIS DATA**

A. Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD di Lampung Utara

Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan APBD. Hal ini bertujuan untuk terjalinnya komunikasi yang efektif demi pengalokasian dana anggaran pendapatan belanja daerah dengan tepat, guna membangun infrastruktur, seperti jalan, bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, dan bantuan dana usaha kecil menengah kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD selesai, maka pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir, dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD seperti tersebut di atas.

DPRD memiliki peran yang sangat sentral guna pertumbuhan pembangunan dari sektor ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Pelaksanaan peran DPRD dalam pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD yang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara secara umum sudah terlaksana, namun jika kita lihat dari segi meningkatkan kemajuan sarana ekonomi dan pembangunan belum berjalan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa porsi pengawasan para wakil

rakyat (anggota DPRD) lebih banyak terfokus dan "terjebak" pada aktivitas pemeriksaan yang berupakan kunjungan kerja baik ke masyarakat, mengangkat permasalahan yang timbul di masyarakat tersebut dalam rapat-rapat dengar pendapat yang lebih cenderung ke permasalahan politis praktis dan tak dapat dipungkiri akhirnya berujung pada politik kepentingan pribadi atau golongan seperti *money politics*. Akibatnya, permasalahan masyarakat tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat. Kondisi masyarakat tidak berubah, walaupun para wakil rakyat telah berbondong-bondong melakukan kunjungan kerja.

hasil dari wawancara dari salah satu anggota DPRD bapak **Febriansyah**, anggota DPRD komisi IV ia menyatakan. "Peninjauan atau observasi lapangan Anggota kami biasanya dilakukan apabila ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan proyek-proyek tersebut, dan biasanya pengaduan tersebut didasarkan atas adanya masalah-masalah teknis maupun masalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan, saat itulah anggota mulai turun ke lapangan dan kemudian melihat langsung masalah apa yang terjadi di lapangan dan mulai mencari solusi untuk menangani masalah tersebut "

Pendapat yang hampir senada juga terucap dari Bapak **Joni Bedyal** selaku sekretaris komisi IV " Tentunya pasti ada anggota yang turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan atau diprogramkan oleh masing-masing dinas, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan secara rutin "

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, setelah hasil wawancara dianalisa maka ada beberapa point penting

menyangkut pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Dari hasil wawancara dapat kita lihat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Perumusan sampai pada pertanggungjawaban APBD, kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pada proses perencanaan penyusunan APBD, pihak DPRD tidak ikut serta dalam merumuskan APBD, dengan demikian DPRD tidak mengetahui secara rinci untuk kegiatan apa saja dana APBD tersebut digunakan, hal inilah yang kemudian menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan dana APBD.

b. DPRD tidak melaksanakan pengawasan atau peninjauan lapangan (observasi) secara rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu tiga kali dalam sebulan, sehingga DPRD tidak mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek maupun masalah yang terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut. Pihak DPRD hanya sebatas menunggu laporan dari masyarakat atau pihak-pihak lainnya mengenai masalah yang terjadi di lapangan, kemudian barulah mereka turun lapangan untuk memastikan masalah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Kedua point di atas adalah kelemahan dari pelaksanaan pengawasan pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara padahal kedua tahapan tersebut merupakan tahapan inti untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana APBD maupun kelebihan dana APBD, akan tetapi

padarealisasinya kedua tahapan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak DPRD. Berdasarkan fakta-fakta yang peneliti dapatkan dilapangan dan melalui hasil wawancara, maka kemudian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara masih dalam kategori kurang baik, hal ini ditandai dengan tidak dilaksanakannya dua pokok tahapan pengawasan oleh DPRD seperti yang telah dibahas di atas.

B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan APBD.

DPRD adalah suatu lembaga permusyawaratan rakyat yang dibentuk dari peraturan undang-undang tentang kelembagaan negara yang memiliki suatu tugas penting mengemban tugas, menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang di amanatkan oleh rakyat dipemerintahan, guna menciptakan suatu kemaslahatan umat.

Dalam negara Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya, dalam negara islam prinsip tersebut adalah prinsip Tauhid, Sunnatullah, dan persamaan sesama manusia, dan juga terdapat prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.

Pedoman dasar tersebut juga menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip DPRD dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

DPRD itu sendiri dalam Islam disebut *Ahl-Al-Hall Wa-Aqdy* yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendekiawan mereka serta keiklasan

mereka.juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum hukum yang diperlukan. Posisi *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan DPRD yang dalam hal ini *ahl-al-hall wa-aqd* sebagai lembaga pembuat peraturan sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin.

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah *ahlul ikhtiar* dan mereka juga ialah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusiaonal dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas merekamencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyatoleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran. Tugas *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat in'iqad kepada khlifah. Agar yang Imam al-Mawardi berkata jika *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* telah berkumpul untuk memilih maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan *Immamah* (khalifah) yang memenuhi seluruh persyaratan. Mereka harus mendahulukan yang banyak kelebihan-nya, yang paling sempurna persyaratan nya, dan yang paling segera di taati rakyat , tanpa bergantung pada pembaiatannya”

Selain itu *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* juga harus melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan

oleh nash. Disinilah perlu al-Sulthah al-Tasyriah tersebut diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa, mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping itu harus ijtihad anggota legislatif atau *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih dandaf al-malfasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil putusan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Dari uraian diatas dapat diketahui Islam mengatur dan menentukan segala kepentingan umat dalam segala bentuk-bentuk peraturan sistem pemerintahan suatu Negara dengan membentuk *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* atau yang dikenal saat ini DPRD, dan Islam memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu Negara, hanya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pembentukan DPRD adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi sumber-sumber dana yang syah yang di kelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahan nya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Pelaksanaan Peran DPRD dalam Pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara pada hal-hal tertentu seperti; dalam pengawasan dana yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan berupa fisik, berdasarkan penelitian yang didapati bahwa Pelaksanaan Peran DPRD dalam Pengawasan APBD tersebut belum berjalan cukup baik hal ini di lihat dari masih banyak nya keluhan dari masyarakat yang merasa belum terpenuhi hak-haknya karna merasa pembangunan di plosok-plosok tempat mereka belumlah sampai. Ini berarti bahwa dalam menjalankan pengawasan berupa turun kelapangan langsung yang dilakukan oleh DPRD di Kabupaten Lampung Utara belum berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti pengertian pada konsep Fiqih Siyasah.

Di antara tugas dan kewajiban DPRD Kabupaten Lampung Utara juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Karna itulah salah satu tugas DPRD dalam konsep Fiqih Siyasah.

dalam Fiqih Siyasah juga mengatakan tugas yang terpenting dari DPRD adalah membuat undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan hidup masyarakat Kabupaten Lampung Utara, dalam pembuatan undang-undang masalah peningkatan ekonomi masyarakat, Kabupaten Lampung Utara sudah dilaksanakan upaya penigkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya berbagai macam bantuan yang telah di berikan oleh pemerintahan

Kabupaten Lampung Utara seperti bantuan berupa uang kepada masyarakat yang tidak mampu di keluarkan setiap enam bulan sekali.

Dalam Negara Islam, kekuasaan dan kedaulatan rakyat dibatasi dengan syari'ah dan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Rakyat tetap memiliki kedaulatan, kekuasaan dan kebebasan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menentukan undang-undang. Rakyat tetap memiliki hak untuk membuat undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum utama ini. DPRD atau *ahl al-h alli wa al-'aqd* seharusnya dapat berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam Islam sendiri diajarkan bahwa harta negara/daerah di prioritaskan untuk orang-orang miskin agar harta tidak berputar-putar saja pada orang-orang kaya dan Allah menjanjikan hukuman bagi orang yang tidak mentaatinya.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD Kabupaten Lampung Utara harus berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dalam menentukan suatu kebijakan, dan berdasarkan konsep kebajikan dalam bermusyawarah, dan mengembalikan kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya) jika menemukan perbedaan diantara anggota dalam kebijakan nya, Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksanakan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat. Firman Allah dalam .(QS.an-nisa' (4): 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-nisa' (4): 59)

Selain itu DPRD Dalam menjalankan tugasnya juga harus mempunyai kekuatan dalam menyampaikan pendapat demi kebenaran guna kepentingan membela yang lemah, kemudian berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat, serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah jika prinsip ini dipegang teguh oleh DPRD dalam mewakili rakyat di pemerintahan sungguh ini akan berdampak baik bagi semua. Dalam firman Allah mengatakan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imran (3):104)

Dari ayat –ayat di atas dapat kita pahami bahwasanya DPRD atau *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* dalam melaksanakan tugasnya haruslah berpedoman pada dasar atau prinsip-prinsip keadilan dalam mewakili umat didalam pemerintahan guna membangun kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran pengawasan DPRD selaku wakil rakyat daerah terhadap APBD di Lampung Utara sudah berjalan cukup baik. namun secara umum masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan lagi, dilihat dari aspek komunikasi didalam internal pemerintahan itu sendiri baik anggota DPRD dan pemerintah selaku eksekutif dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna kemaslahatan masyarakat khususnya yang ada di Lampung Utara. DPRD seharusnya tidak melakukan secara teori saja namun harus ada hal yang lebih nyata dilakukan oleh DPRD seperti membangun infrastruktur baik berupa, jalan, pembuatan bendungan adanya saluran air bersih, pembangunan tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang ada di setiap kecamatan, serta perbaikan-perbaikan gedung-gedung sekolah baik tingkat SD-SMP dan SMA guna menunjang pelayanan di bidang pendidikan. Namun daerah-daerah yang lokasinya sudah sangat jauh pusat perkotaan namun masih dalam cakupan wilayah Kabupaten Lampung Utara masih banyak yang belum merasakan dari pembangunan tersebut.

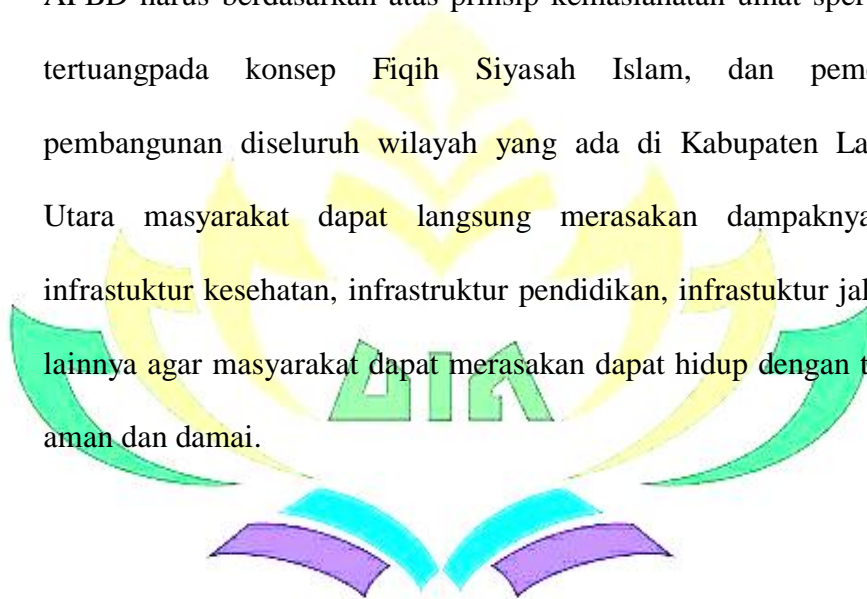
2. Peran DPRD dalam pengawasan APBD dalam mengalokasikan anggaran belum berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada Konsep Fiqih Siyasah Islam yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Hal ini terlihat pada kepentingan masyarakat masih banyak masyarakat yang jauh dari perkotaan masih belum merasakan dampak pemerataan pembangunan infrastruktur disegala bidang baik infrastuktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastuktur jalan dan lainnya. Karna ini menyangkut kemaslahatan umat secara keseluruhan seharusnya yang dalam hal ini DPRD dan pemerintah harus melakukan pemerataan pembanguan sampai ke tempat-tempat yang sudah jauh dari pusat kota supaya tidak ada ketertimpangan baik masyarakat yang ada di kota maupun masyarakat yang ada di plosok wilayah. Karna pada dasar nya sudah menjadi tanggung jawab pemimpin untuk mengutakan kemaslahatan masyarakatnya.

B. Saran

1. Sebaiknya DPRD Kabupaten Lampung Utara dan pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus saling bersinergi dalam menjalin hubungan guna menciptakan suatu komunikasi yang baik supaya meningkatkan kerjasama dalam pembangunan di segala bidang guna membangun Kabupaten Lampung Utara yang lebih maju dan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi

pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat yang sebagaimana mestinya yang telah menjadi tujuan dari Undang-Undang.

2. Seharusnya DPRD dalam melakukan pengawasan dan menjalankan APBD harus berdasarkan atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqih Siyasah Islam, dan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Lampung Utara masyarakat dapat langsung merasakan dampaknya baik infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur jalan dan lainnya agar masyarakat dapat merasakan dapat hidup dengan tentram aman dan damai.



DAFTAR PUSTAKA

- Abudul Aziz Dahlan, et at., *insklopedi hukum islam*, jakarta: ichtiar baru Van Hoeve, 1995
- Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taquddum, 1397 H/1977 M
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009
- Ali Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Al-mawardi, al-ahkam al-sultaniyah *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Pers, 2015
- Anton Bakker, *metode-metode filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Bagian umum sekretariat DPRD Lampung Utara
- Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Dijazuli. *fiqh Siyasah*, Prenada Media, Jakarta. 2000
- Hendri k, *pemikiran muhammad iqbal dan pengaruhnya terhadap pembaruan hukum islam*, jurnal al-'adalah vol. xii, no. 3, 2015
- Muhammad Iqbal Fiqh Siyasah, *Konteksituasi Doktrin Politik Islam* Pena Media Grup Jakarta: 13220.
- Fathi Osman, "the concept for the appoitmeny of the head of an islamic state", dalam Mumtazh Ahmad, *state, politic of islam*, washington: american trust publication, 1986
- Farid abdul kalid. *Fikih politik islam* sinar grafika offset: jakarta 13220.
- Frenki, "Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam", Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Ichlasul Amal, *Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995
- Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Jakarta: Adeksi, 2004
- Kansil, C. S. T., Kansil, Cristine C. S. T. *Sitem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Khairul Ikhwan Damanik et.al, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Obor, 2010

Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Muhammad Rasyid Ridha, *tafsir al-manar*, Kairo: maktabah al-khairah, 1960

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2013

Kansil, Cristine Kansil *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* Jakarta: PT Ranika Cipta, 2008

Soejino Soekanto, *pengantar penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2005.

Surtisno Hadi, *metodologi research* Yogyakarta: fak Psikologi UGM, 1985

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 365 Ayat 1

Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 366 Ayat 1